

Analisa Faktor Pendukung *Vicious Circle of Poverty* di Masyarakat Nelayan

¹Lutvia Resta Setyawati, ²Anneke Sri Avhanti, ³Ariska Dian Novarianti

¹Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan RI

Email : lutviaresta34@student.upi.edu

²Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor

Email : annekesriavhanti@apps.ipb.ac.id

³Manajemen, Universitas Nusa Putra

Email : ariskadian@gmail.com

Abstract

The wealth of marine resources in Indonesia does not necessarily guarantee the welfare of the fishing community. Poor fishermen in rich seas are a negative stigma attached to our maritime world. This study aims to reveal the supporting factors of the vicious circle of poverty that ensnares fishermen in the country. The researcher used a descriptive qualitative approach and literature study to obtain an appropriate description of the data. The results of the study show five factors that support fishermen's poverty, including the patron-client system, the economic impact of destructive and over fishing, environmental damage, low infrastructure quality, and negative perceptions of the fishing profession.

Keywords : Vicious Circle Of Poverty; Fishing Community; Archipelagic State.

Abstrak

Kekayaan sumber daya kelautan di Indonesia secara faktual ternyata tidak serta-merta menjamin kesejahteraan hidup masyarakat nelayan. Nelayan miskin di laut yang kaya adalah stigma negatif yang melekat di dunia kemaritiman kita. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor pendukung *vicious circle of poverty* yang menjerat para nelayan di tanah air. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur untuk mendapatkan penggambaran data yang sesuai. Hasil studi menunjukkan lima faktor yang mendukung kemiskinan nelayan diantaranya adalah sistem patron-klien, dampak ekonomis dari *destructive and over fishing*, kerusakan lingkungan, kualitas infrastruktur yang rendah, dan persepsi negatif mengenai profesi nelayan.

Kata Kunci : Lingkaran Setan Kemiskinan; Masyarakat Nelayan; Negara Kepulauan.

PENDAHULUAN

Sebagai *archipelagic state* terluas di dunia, perairan Indonesia disinyalir sebagai salah satu wilayah dengan *marine megabiodiversity* yang kompleks. Hampir 2/3 wilayah kita adalah laut, luasnya sekitar 5,4 juta km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km (Ambari, 2020). Laut menyumbang sekitar 12,54 juta ton ikan/tahun, dengan potensi lestari hingga \$20miliar/tahun (KKP, 2020).

Nilai perikanan disokong oleh berbagai sektor ekonomi kelautan yang lain, seperti *marine tourism*, pengembangan hutan bakau, konektivitas dan perhubungan laut, sumberdaya alam non-hayati, pengembangan pulau-pulau kecil, perikanan, tambang, energi, industri dan jasa maritim, dan lain-lain. Kesebelas sektor ekonomi ini bahwa diperkirakan bisa menampung 35% dari total angkatan kerja di NKRI. Sayangnya, Indonesia baru memanfaatkan 25% sumber daya dari keseluruhan potensi yang ia punya (WANTIMPRES, 2017).

Dari kekayaan alam itu, pemerintah sudah selayaknya bisa mendapatkan GDP yang besar untuk menyokong kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area pesisir. Namun sayang, secara faktual data di lapangan malah menunjukkan fenomena yang bertentangan.

Meskipun pemerintahan Jokowi telah menggiring Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia, namun sampai saat ini kebijakan tersebut dianggap masih menggantung dan belum menunjukkan hasil yang lebih berarti. Dalam kancah geopolitik maritim, Indonesia bahkan masing terjebak diantara dua kekuatan besar (China dan Amerika). *Belt Road Initiative* (BRI) terlihat sangat menggiurkan karena menawarkan injeksi modal dan bantuan dana.

Sedangkan geliat USINDOPACOM bisa menawarkan kerjasama bilateral dengan Amerika untuk mengamankan wilayah nusantara.

Secara ekonomi, nilai ekonomi kelautan belum mendominasi sektor perekonomian secara nasional. Menurut data BPD (2021), jumlah penduduk miskin per Maret 2020 adalah 10,14% yakni sekitar 27.540.000 jiwa. Dari data tersebut, penduduk miskin di wilayah perkotaan berkisar di angka 7,88%, atau 12.180.000 jiwa. Sedangkan warga miskin dari wilayah pedesaan adalah 13,20% atau 15.370.000 jiwa.

Kemiskinan biasanya diperparah juga dengan beban demografis yang tinggi, data menunjukkan rata-rata rumah tangga miskin di nusantara dihuni oleh 4,49 orang per kepala rumah tangga. Dari 270 juta rakyat Indonesia, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan adalah 16.200.000 jiwa. Sedangkan 90% atau 14.580.000 jiwa dari angka itu, tergolong sebagai 'nelayan miskin'. Mereka dianggap tidak memiliki kapasitas untuk berdaya dalam sektor ekonomi dan politik (Anwar & Wahyuni, 2019).

Wilayah pesisir dikenal sebagai kantong-kantong potensial dimana kemiskinan struktural terjadi secara merajalela (Kusnadi, 2002). Nelayan bahkan mendapat gelar *the poorest of poor*, karena jumlah nelayan yang bertengger di bawah garis kemiskinan mencapai angka 90% dari total seluruh populasi (Anwar & Wahyuni, 2019). Kemiskinan bermanifestasi sebagai lingkaran setan (*Vicious Circle*). Selain menjebak para nelayan, kemiskinan juga berperan penting untuk menurunkan kualitas hidup dari anak-cucu mereka.

Hal ini senada dengan penelitian Mayang Rizky dkk mengenai "*Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia*". Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terlahir di keluarga miskin, 87% akan tumbuh dengan pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang terlahir di keluarga kaya (Rizky et al., 2019).

Kemiskinan memang bukan faktor genetik yang bisa diwariskan, namun

kekurangan finansial jelas berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi di pesisir harus mendapat perhatian secara serius.

Berdasarkan hal itu, maka peneliti akan berusaha menjawab mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan nelayan di perairan laut Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menambah khazanah tentang *maritime poverty* dan memberi saran dan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan desain penelitian kualitatif dan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menunjukkan deskripsi mengenai fenomena alamiah dan fenomena yang direkayasa oleh manusia. Fenomena ini bisa saja termanifestasi dalam aktivitas, bentuk, hubungan, perubahan, karakteristik, dan perbedaan antar fenomena (Linarwati et al., 2016). Sedangkan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dibentuk oleh filsafat postpositivisme, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menganalisis objek secara alamiah (Sugiyono, 2008).

Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur melalui buku, jurnal, majalah, situs resmi, publikasi institusional, dan lain-lain. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti melakukan proses triangulasi sumber terhadap data-data yang sudah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas kemiskinan, ada berbagai pendapat tentang tolok ukur ideal yang bisa digunakan untuk menganalisis kemiskinan pada individu dan kelompok masyarakat. Menurut

Eupon Union, kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki jangkauan terbatas terhadap sumberdaya material, sosial, dan budaya (Khomsan et al., 2015).

Di Indonesia, salah satu indikator kemiskinan yang dipakai adalah pengukuran Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan hasil penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM), ditambah dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut data BPS (2021), nilai GK di Indonesia per Maret tahun 2021 berkisar di Rp472.525/kapita/bulan dengan nominal GKM di angka Rp349.474 atau 73,96% dan nominal GKNM bertengger di angka Rp123.051/kapita/bulan atau 26,04%. Berdasarkan penelitian Setyorini (2013), kemiskinan nelayan bisa terjadi karena gagalnya proses transformasi modal dari generasi ke generasi.

Modal terdiri dari modal politik, modal sosial, *human capital*, modal material, dan modal natural. Kusnadi (2002) juga menjelaskan jika kemiskinan merupakan lingkaran setan (*vicious circle of poverty*) yang mendorong nelayan untuk melakukan *overexploitation of natural resoces* dan degradasi terhadap kelestarian ekologi laut yang ada di sekitar mereka.

Menurut peneliti, kemiskinan yang terjadi di masyarakat nelayan bisa disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Struktur yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat secara tidak langsung bisa memberi efek pada penurunan kapabilitas masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Di sisi lain, budaya dan tingkah laku yang buruk juga bisa menyebabkan lingkaran kemiskinan semakin awet mendekati masyarakat yang hidup di area pesisir. Kedua faktor tersebut bisa dijabarkan dalam skala yang lebih mendetail, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan nelayan diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Sistem Patron-Klien

Relasi patronase menjebak nelayan-nelayan buruh agar bekerja kepada para pemilik modal dan alat tangkap yang itu-itu saja. Biasanya mereka membuat perjanjian untuk menjual ikan ke tempat yang sudah disepakati, dengan harga (yang seringkali) lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Nelayan buruh tentu tidak memiliki pilihan lain karena ketidaktersediaan modal dan alat, terjebak sistem yang rigid dan siklus kemiskinan di sepanjang karir melaut mereka.

Di Indonesia, kita juga mengenal sistem *ijon* yang polanya hampir mirip dengan ini. Para tengkulak mengumpulkan beberapa nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada mereka, tentu dengan harga yang lebih murah dari pasar. Kondisi seperti ini tentu akan merugikan para nelayan. Jika dalam praktiknya ada permainan harga di sana-sini, para nelayan tidak terpengaruh dan selalu mendapat keuntungan yang tidak optimal (bahkan kadang-kadang defisit).

Menurut Sinaga et al., (2015), pola hubungan patron-klien di komunitas nelayan biasanya ditandai dengan keterikatan ekonomi dalam kegiatan pemasaran (*product marketing*), perhitungan bagi hasil laba dan kerugian, serta fasilitas bantuan dan perlindungan untuk nelayan selama beraktivitas di laut. Sedangkan hubungan patronase yang bersifat non-ekonomis, misalnya adalah proses penjaminan sosial yang dilakukan oleh patron kepada kliennya.

Aktivitas untuk saling berbagi manfaat dan kebaikan itu kemudian akan bermanifestasi menjadi bentuk-bentuk ketergantungan yang lain. Hal ini secara tidak langsung juga membentuk sistem kasta di masyarakat nelayan. Siapa yang memiliki modal dan alat, berhak duduk di kasta yang lebih tinggi dari nelayan buruh.

B. Dampak ekonomis dari *over fishing* dan *destructive fishing* (DF/OF)

Kegiatan *over fishing* biasanya dilakukan oleh nelayan-nelayan besar yang memiliki akses terhadap sumberdaya kapal dan alat tangkap yang modern. Alat ini tentu akan menghasilkan ikan yang lebih banyak dalam waktu singkat. DF/OF kemudian berpengaruh terhadap aktivitas nelayan-nelayan kecil. *Fishing ground* ikan yang bergeser atau hilang akhirnya memaksa para nelayan kecil untuk mencari ikan tanpa mempertimbangkan ukuran dan metode penangkapan yang baik. Atas dorongan ekonomi, nelayan yang jujur kemudian mendapat efek domino dan memiliki dorongan untuk bertransformasi menjadi pelaku perusakan lingkungan juga.

Menurut data KKP (2019), aktivitas *destructive fishing* tertinggi berada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Bali. Perhatikan gambar di bawah ini.



Peta Rawan Pelanggaran *Destructive Fishing*
Sumber: KKP (2019)

Destructive fishing basa dilakukan dengan penggunaan bahan peledak (misalnya NH_4NO_3 atau *ammonium nitrat* dan KNO_3 atau *potassium nitrat*), alat sertrum, dan larutan bahan kimia yang beracun (seperti *potassium sianida*).

Masalah lain juga tercium di proses distribusi. Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan bahwa ikan yang ditangkap melalui *destructive fishing* tidak akan lolos sertifikasi, tetapi proses pendeteksian terhadap ikan yang diracun masih terbilang sulit.

C. Kerusakan Lingkungan Pesisir

Menurut laporan Chen et al., (2020), kerusakan lingkungan berdampak buruk terhadap standar ekonomi masyarakat nelayan di pesisir. Kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan nelayan. Namun di sisi lain, kemiskinan juga mendorong nelayan untuk melakukan kegiatan degradasi lingkungan (secara disengaja atau tidak). Berkaca pada pendapat Bharadwaj (2016) dan beberapa penyesuaian terhadap kehidupan nelayan, kemiskinan akan mempengaruhi masyarakat untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan karena dipengaruhi faktor demografis, pembuangan kotoran dan limbah manusia ke laut, konflik perebutan ruang hidup antar semua komponen makhluk hidup di sana, proses pencemaran air dan udara karena aktivitas manusia, intrusi air laut yang disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan, dan beberapa bencana turunan lainnya.

Dalam kasus ini, kemiskinan dan degradasi lingkungan merupakan dua faktor yang saling berhubungan. Mereka terikat dan saling mempengaruhi. Untuk menjembatannya, pemerintah dengan menggandeng aktor swasta bisa menawarkan konsep *blue economy* kepada masyarakat nelayan.

Ekonomi biru dianggap sebagai jembatan dan jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan dan kemiskinan yang biasa terjadi pada masyarakat pesisir. Prinsip-prinsip Blue Economy dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan positif pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan (Pauli, 2010). Ekonomi biru biasanya dilandaskan pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif, tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional secara masif (Zamroni et al., 2018).

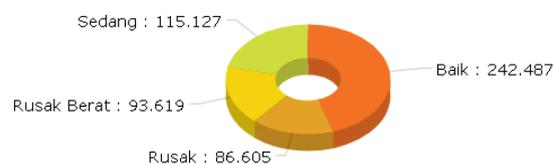
Ekonomi biru juga menekankan prinsip *zero waste* agar setiap sumber daya yang diambil dari alam bisa dimanfaatkan manusia secara optimal. Jika nelayan mengambil ikan tuna di laut, maka dia harus mengolah semua bagian ikan tanpa terkecuali. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk penduduk adalah sosialisai, edukasi, pelatihan, sertifikasi, dan injeksi modal.

D. Rendahnya Kualitas Infrastruktur

Faktor lain yang mendorong kemiskinan adalah rendahnya kualitas dari infrastruktur umum. Padahal menurut M. Rizal Taufikurohman (2016), perkembangan kemaritiman di NKRI harus dijalankan secara optimal dan terintegrasi. Faktor-faktor seperti lingkungan strategis juga berperan untuk mendorong investasi dan proses ekonomi yang seimbang.

Industri maritim yang berkelanjutan akan disokong oleh keberadaan sarana transportasi laut (*sea transportation*) yang lengkap dan berkualitas, industri galangan kapal (*ship building*) yang tangguh dengan fasilitas *maintenance* yang bagus dan memadai, serta pembangunan dan proses pengoperasian pelabuhan yang optimal (*port construction and operation*).

Jalan rusak merupakan salah satu permasalahan tahunan yang menggerogoti kegiatan perekonomian kita. Menurut data tahun 2016, hampir 1/3 jalan di Indonesia mengalami kerusakan sedang, ringan, atau berat. Perhatikan data berikut.



Data Jalan Rusak di Indonesia
Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan *chart* tersebut, 180,24 km jalan di Indonesia mengalami kerusakan (33,5%) baik yang sedang hingga berat. Dari data itu, jalan dalam kondisi sedang adalah 115,12 km, rusak berat 93,61 km, rusak 86,6 km, dan baik 242,48 km. Kejadian yang sama terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan

Tambak Lorong di Kota Semarang. Kondisi jalan yang rusak dan kepasifan PEMDA memaksa masyarakat untuk memperbaiki jalan secara mandiri dengan alat dan bahan seadanya. Seiring waktu, jalan kembali rusak dan menghambat pergerakan barang, jasa, serta kegiatan ekonomi kelautan lainnya.

Hal ini tentu bertentangan dengan kondisi optimal sebuah negara. Gulay Malkoc (2015), mengatakan bahwa *"roads make a crucial contribution to economic development"* atau jalan akan memberikan kontribusi yang krusial terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara. Kasus ini terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia, misalnya Bandar Lampung, Aceh, Yogya, dll.

E. Persepsi Buruk Tentang Nelayan

Persepsi bahwa nelayan adalah profesi rendah, ikut berkontribusi terhadap lambatnya perkembangan ekonomi maritim di Indonesia. BPS mencatat, sepanjang tahun 2000-2016, jumlah nelayan turun drastis dari 2jt ke angka 966 ribu orang (Anna, 2020). Nelayan dianggap sebagai profesi minor yang *unpredictable*, *minim income* tapi *high risk*. Dengan hasil yang tidak seberapa, nelayan diharuskan untuk berlayar ke laut yang misterius dan penuh tantangan.

Penurunan angka nelayan bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia, fenomena ini juga berlaku di berbagai belahan dunia manapun (Arnason, 2020). Banyak anak muda yang enggan menjadi nelayan, padahal jika Indonesia benar-benar berambisi untuk menjadi Poros Maritim Dunia, budaya maritim harus dikembalikan dengan memperbanyak sumber daya manusia yang berkecimpung di dunia kemaritiman.

Paradigma nelayan miskin di laut yang kaya sepertinya harus mengalami berbagai perubahan, stigma negatif itu tidak seharusnya melekat di nama

Indonesia. Nelayan tidak harus menangkap ikan di wilayah teritorial atau pesisir laut yang sempit, mereka bisa dibekali dengan kapal dan perlengkapan yang lebih lengkap untuk berlayar dan menangkap ikan sampai ke laut lepas. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan analisa dari Ambari (2021) yang mengatakan jika masa depan perekonomian maritim di Indonesia akan dikuasai oleh para nelayan skala kecil, bukan korporat atau para pemegang modal besar. Nelayan ini bekerja pada sektor perikanan tangkap, dan diperkirakan persentasenya akan mencapai hampir 90%.

KESIMPULAN

Kemiskinan nelayan di Indonesia merupakan isu lama yang cukup menggelitik. Sumber daya kelautan yang kaya ternyata tidak bisa dijadikan tolok ukur terhadap kesejahteraan yang tinggi di kalangan masyarakat nelayan. Kenyataan di lapangan malah sebaliknya. Nelayan yang menghadapi laut hampir sepanjang hidup, harus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang terjadi secara laten dan manifest.

Terlebih kemiskinan tersebut selalu berubah menjadi lingkaran setan yang 'secara tidak sengaja' harus diturunkan kepada anak dan cucu mereka. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap lima faktor yang mendorong pelanggaran kemiskinan nelayan di tanah air. Faktor itu adalah sistem patron-klien, dampak ekonomis DF/OF, kerusakan lingkungan, kualitas infrastruktur yang rendah, dan persepsi negatif mengenai nelayan.

Untuk mengatasi hal itu, beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh semua komponen diantaranya:

1. Penjualan ikan satu pintu untuk mengontrol harga dan memaksimalkan *income* dari nelayan-nelayan kecil. Keberadaan tengkulak hanya akan merugikan nelayan dan pembeli ikan.
2. Penetapan wilayah konservasi di kawasan vital, penerapan konsep *blue economy*, dan perbaikan infrastruktur.

3. Mengubah persepsi terhadap pekerjaan nelayan. Sama seperti petani, para nelayan juga seharusnya bisa dididik atau dilatih menjadi nelayan modern dengan alat tangkap yang mumpuni serta pengetahuan spasial yang baik.
4. Pelatihan 'Nelayan Samudera', sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bisa meluas bahkan hingga ke ZEEI.
5. Mewajibkan anak-anak nelayan untuk bersekolah minimal sampai level SMA, pemerintah harus menjamin aksesibilitas untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari. (2021). *Masa Depan Perikanan Dunia adalah Nelayan Skala Kecil*. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/02/masa-depan-perikanan-dunia-adalah-nelayan-skala-kecil/>
- Ambari, M. (2020). *Seberapa Penting Penguasaan Data Kelautan bagi Indonesia?* <https://www.mongabay.co.id/2020/09/11/seberapa-penting-penguasaan-data-kelautan-bagi-indonesia/>
- Anna, Z. (2020). *Menjadi Profesi Termiskin di Indonesia, Benarkah Nelayan Tidak Bisa Bahagia dengan Profesinya?* <https://www.unpad.ac.id/2020/09/menjadi-profesi-termiskin-di-indonesia-benarkah-nelayan-tidak-bisa-bahagia-dengan-profesinya/>
- Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius*, 1(4), 52–60.
- Arnason, R. (2020). *What Happens To Fish When There Is Less Fishing?* <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/02/14/what-happens-to-fish-when-there-is-less-fishing>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab4>
- Bharadwaj, N. D. (2016). *The relationship between poverty and the environment*. <https://www.voicesofyouth.org/blog/relationship-between-poverty-and-environment>
- Chen, S., De Bruyne, C., & Bollempalli, M. (2020). Blue economy: Community case studies addressing the poverty-environment nexus in ocean and coastal management. *Sustainability (Switzerland)*, 12(11). <https://doi.org/10.3390/su12114654>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama. *Siaran Pers*, 53(9), 1689–1699.
- Khomsan, A., Dharmawan, A., Saharuddin, Alfiasari, & Sukandar, Dadang Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KKP. (2020). *Menteri Edhy: Indonesia Masih Butuh Banyak Kapal Ikan*. <https://kkp.go.id/artikel/22667-menteri-edhy-indonesia-masih-butuh-banyak-kapal-ikan#:~:text=Potensi lestari sumber daya ikan,80%25 dari seluruh potensi lestari.>
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Pelangi Aksara.
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1.
- M. Rizal Taufikurohman. (2016). Laporan Akhir Kajian Dinamika Lingkungan Stratgeis Dalam Pembangunan Kemaritiman. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*.

- Malkoc, G. (2015). *The importance of road maintenance*.
<https://www.worldhighways.com/wh8/wh9/wh10/feature/importance-road-maintenance>
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy. 10 Years, 100 Inovatons, 100 Million Jobs*. Paradigma Publicatons. Taos.
- Rizky, M., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2019). Effect of Growing up Poor on Labor Market Outcomes. *ADB Working Paper Series, 1002*.
- Setyorini, H. B. (2013). Budaya Kemiskinan Nelayan Di Mangunharjo Semarang. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan, 8(1)*, 7.
<https://doi.org/10.14710/sabda.v8i1.13219>
- Sinaga, H., Widiono, S., & Irnad. (2015). POLA HUBUNGAN PATRON-KLIEN PADA KOMUNITAS NELAYAN DI KELURAHAN MALABRO KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU The Pattern of Patron-Client Relationship in Fishermen Community in Malabro Municipal, Teluk Segara District, Bengkulu City. *Agrisep, 15(2)*, 167–176.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/article/view/779>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- WANTIMPRES. (2017). *Potensi Perikanan Indonesia*.
<https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia/>
- Zamroni, A., Nurlaili, N., & Witomo, C. M. (2018). Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan Di Kabupaten Lombok Timur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 4(2)*, 39–44.
<https://doi.org/10.15578/marina.v4i2.7439>